



## Peran Kebijakan Moneter Menurunkan Tingkat Inflasi di Indonesia

Elvina Riska<sup>1\*</sup>; Erma Hotnijar Siregar<sup>2</sup>; Bayu Hady Anthony<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [elvinariska05@gmail.com](mailto:elvinariska05@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 23-06-2025

Revised : 28-06-2025

Accepted : 29-06-2025

#### Keywords

Inflation, Monetary Policy, SBI

#### Kata Kunci

Inflasi, Kebijakan Moneter, SBI

### ABSTRACT

This study aims to see how the role of conventional and Islamic monetary policy on reducing inflation in Indonesia. This study is a qualitative study with literature studies, data obtained through books and journals related to the research discussed. The results of this study indicate that the government's way to reduce the inflation rate conventionally is by issuing SBI (Bank Indonesia Certificate) or SBIS (Bank Indonesia Sharia Certificate) if using sharia methods. For further researchers if using the same title, the researcher recommends using qualitative research with the latest data.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peranan kebijakan moneter secara konvensional dan secara islam terhadap penurunan inflasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literatur, data yang diproleh melalui buku serta jurnal yang terkait dengan penelitian yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi secara konvensional dengan mengeluarkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) ataupu SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) apabila menggunakan cara syariah. Untuk Peneliti selanjutnya apabila menggunakan judul yang sama maka peneliti merekomendasikan menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang terbaru.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



## PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena monetarisme yang menyebabkan nilai suatu barang atau jasa tertentu menurun. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi keuangan, distorsi harga, distorsi output, berkurangnya efisiensi dan investasi produktif, serta munculnya ketidakpuasan sosial. Fenomena inflasi disebabkan oleh melimpahnya permintaan barang dan jasa sehingga menaikkan harga. Inflasi akan menyebabkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih lambat, yang akan meningkatkan harga komoditas secara tajam dan mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan devaluasi mata uang (Kelvin, 2022). Tingkat inflasi, atau gambaran perubahan harga selama periode waktu tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan sejauh mana krisis ekonomi yang sedang dihadapi. Selama periode ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai ambang batas yang lebih tinggi yang disebut hiperinflasi.

Sejak 14 Agustus 1997, terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang berdampak pada tingkat inflasi di Indonesia. Saat nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar dan prinsip penawaran serta permintaan, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang (Free Floating Exchange). Dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, nilai ekspor mengalami peningkatan. Hal ini membuat barang-barang domestik lebih terjangkau, memicu peningkatan minat orang terhadap produk-produk tersebut. Dengan meningkatnya permintaan, secara bertahap harga naik, yang pada akhirnya menyebabkan inflasi.

Untuk menghindari inflasi, pemerintah mengembangkan sejumlah kebijakan moneter. Secara definisi, kebijakan moneter adalah strategi makro ekonomi yang dikelola Bank Sentral untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dengan memperhatikan suku bunga atau Jumlah Uang Beredar (JUB) guna menjaga kestabilan nilai rupiah (Assa *et al.*, 2020).

Kebijakan moneter merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian. Menurut Little Boy dan Taylor, kebijakan moneter adalah upaya atau tindakan Bank Sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter (jumlah uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan perekonomian tertentu yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang dan keseimbangan eksternal. Dan perluasan peluang kerja (Khoirudin, 2021). Sukirno (1985) mendefinisikan kebijakan moneter sebagai strategi makroekonomi bank sentral untuk memantau Jumlah Uang Beredar (JUB) atau suku bunga, yang mempengaruhi kegiatan perekonomian. Secara relatif, kebijakan moneter tidak terpengaruh oleh kebijakan dan peraturan yang mengatur sektor keuangan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa jumlah uang beredar bersifat eksogen dalam teori moneter karena bank sentral memiliki kendali penuh atas jumlah tersebut (Gema, 2022).

Pemangku kepentingan kebijakan pemerintah mempunyai peran khusus dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam situasi ini, kebijakan moneter digunakan untuk mendukung terpeliharanya stabilitas harga, yang tercermin dalam tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang moderat (Gema, 2022). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutawijaya & Zulfahmi (2012) dan Setyawan (2010) dalam (Sudarsono, 2018), peningkatan biaya unsur produksi dan peningkatan permintaan barang-barang produksi merupakan penyebab konvensional terjadinya inflasi.

Komoditas mengalami kenaikan dalam situasi campuran (*mixed*) dan pengangguran (*demand pull*). Menurut Pohan dalam (Saridawati, 2018) tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan ekspektasi masyarakat merupakan tolak ukur stabilitas moneter. Tolok ukur stabilitas moneter yang berbasis inflasi mendorong Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikkan suku bunga, sehingga mendorong masyarakat untuk menabung dan menjaga kondisi pasar tetap stabil dan bebas dari dampak kenaikan harga yang tajam (Rahutami, n.d.).

Menaikkan suku bunga diperlukan untuk menstabilkan pasar karena kenaikan harga yang signifikan dapat mengakibatkan lemahnya daya beli dan berkurangnya antusiasme terhadap sektor riil. Untuk menjaga kestabilan harga lokal dan menarik investor asing, Bank Indonesia juga harus mengendalikan fluktuasi nilai rupiah. Faktanya, ada beberapa contoh di mana penurunan nilai rupiah dapat menarik modal asing dan mendorong pertumbuhan. (Haryono *et al.*, 2019). Menurut penelitian Roger (2007), terdapat korelasi yang menguntungkan antara tren inflasi dan pembangunan ekonomi. Selain itu, pencapaian target inflasi yang rendah atau stabil dapat berdampak baik pada perbaikan kondisi keuangan. Daya beli masyarakat menurun akibat inflasi karena tingkat pendapatan ikut turun. Seiring berjalannya waktu, terjadi trade-off antara inflasi dan penurunan, meskipun faktanya inflasi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian. Inflasi dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan perekonomian negara atau menurunkan angka kemiskinan (Harahap *et al.*, 2022).

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengatur likuiditas dan mengurangi tekanan inflasi. SBI digunakan untuk menarik likuiditas pasar, menurunkan ekspektasi inflasi, dan mengekang konsumsi berlebihan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kebijakan moneter ini secara signifikan memengaruhi kemampuan Indonesia untuk menstabilkan inflasi. Dengan menerbitkan SBI dan mengubah suku bunga, BI dapat mengatur aliran uang, yang pada gilirannya mengatur laju inflasi. Lebih jauh, pengendalian ekspektasi inflasi oleh pelaku pasar dan masyarakat melalui perangkat kebijakan moneter juga telah berhasil memengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Pravitasari & Insukindro, 2023).

Menurut Al-Arif (2010), sebaliknya, dalam perspektif Islam kesalahan manusia, seperti konsumsi berlebihan, serta kelemahan alami pada sisi penawaran dan permintaan adalah penyebab utama inflasi. Inflasi dapat memberikan dampak negatif terhadap pendapatan riil masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara menurun akibat tidak dapat diprediksinya tingkat inflasi sehingga mengintimidasi (ketidakpastian) para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan mengenai produksi, investasi, dan konsumsi (Pravitasari & Insukindro, 2023).

Di Indonesia inflasi adalah hal yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dapat dilihat dari pasar, saham serta nilai tukar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting bagi pembaca untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan moneter untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Hal ini dilakukan untuk merangkum sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik di bahas. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya untuk menghasilkan penelitian yang baik. Dalam literature review, peneliti melakukan analisa pada masalah yang akan dijadikan topik literature review, di tahap kedua, peneliti menganalisis indikator masalah yang ada dalam Literature review, ketiga, menganalisis sumber untuk dijadikan pembanding, langkah ke empat, menganalisis desain desain penelitian dari penelitian sebelumnya, langkah ke lima, peneliti menganalisis waktu terbit artikel pembanding. Hasil analisis diharapkan dapat memperkuat penelitian terdahulu terhadap fakta peran kebijakan moneter untuk menurunkan inflasi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian dan aktivitas moneter yang stabil menjadi indikasi suatu negara akan berada pada tingkat inflasi yang turun antara satu hingga dua digit. Daya beli masyarakat akan menurun akibat tingginya tingkat inflasi karena uang kehilangan nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang dapat membeli satu karung beras seharga Rp 100.000 pada kondisi inflasi normal, maka daya belinya akan turun ketika inflasi naik hingga 30% karena ia hanya mampu membeli setengah karung beras. Peristiwa serupa juga akan dialami oleh para pengusaha, biaya akan meningkat dan harga bahan baku akan meroket sehingga produsen mengurangi jumlah produksi hal ini berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi (Salim, 2018).

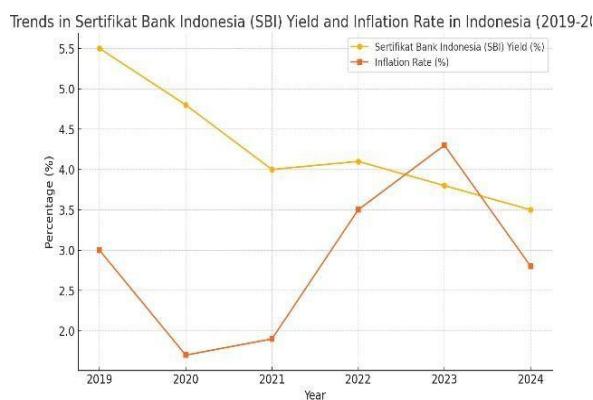
Menurut Sukirno (2006), salah satu cara inflasi mempengaruhi kekayaan adalah melalui pembagian kekayaan karena mereka yang memiliki pendapatan tetap akan mengalami penurunan nilai riil pendapatannya, dan mereka yang memiliki kekayaan finansial akan mengalami penurunan nilai riil nilai kekayaan mereka. Dampak lain dari inflasi adalah mendorong redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, fenomena ini dikenal sebagai “*redistribution effect of inflation*”. Redistribusi pendapatan akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan aktual seseorang sekaligus menurunkan pendapatan orang lain, sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat (Putri & Sari).

Kebijakan moneter menggunakan peubah jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat bunga (*interest rate*) untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengendalikan ketidakstabilan perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dalam hal ini BI juga dapat mengendalikan jumlah uang beredar, kredit dan perbankan (Irawan, 2023).

Mekanisme bunga merupakan salah satu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensional untuk menurunkan inflasi. Perubahan struktural menjadi topik utama saluran nilai tukar. Permintaan uang selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga di sektor perbankan, yang pada gilirannya berdampak langsung pada inflasi. Dampak suku bunga terhadap kemampuan Malaysia dalam menurunkan inflasi. Negara-negara terkemuka di Asia juga menerapkan bunga langsung, yang mempunyai dampak lebih kuat terhadap inflasi. Boschen dan Weise (2003) menemukan bahwa suku bunga berdampak pada biaya modal, yang meningkatkan biaya

produksi. Impor memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan ekspor dan menyebabkan inflasi dan pertumbuhan produksi (Harahap *et al.*, 2022).

Bank Indonesia atau disebut BI dapat mengendalikan inflasi yang berlebihan dengan membatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menerbitkan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Salah satu instrumen kegiatan pasar terbuka, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai surat kuasa utang jangka pendek dalam mata uang Rupiah. Bank dan pihak lain yang ditunjuk BI untuk melakukan pemindah tanganan dapat memiliki SBI. Selain itu, pembelian SBI dapat dilakukan di pasar perdana, dan tata cara perdagangan longgar serta jual beli bersyarat dapat digunakan untuk melakukan transaksi di pasar sekunder (Gema, 2022).



**Gambar 1. Grafik Hubungan SBI Menurunkan Inflasi**

Dari gambar di atas terdapat tren imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingkat inflasi rentang 2019-2024. Dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya kebijakan moneter berupa SBI mengakibatkan terkontrolnya Inflasi dengan penurunan imbal hasil SBI. Imbal hasil SBI terus mengalami penurunan pada tahun 2024, seiring dengan Bank Indonesia menurunkan Inflasi.

Muhammad Taqiyuddin (2012) menyatakan bahwa tujuan penerbitan dan penjualan SBI adalah untuk menjaga agar uang yang jumlahnya berlebihan tidak digunakan untuk melawan inflasi. Kenaikan suku bunga menunjukkan bahwa Bank Indonesia akan berupaya mengendalikan inflasi ketika inflasi diperkirakan berada pada persentase yang tinggi. Sebaliknya kenaikan suku bunga menunjukkan bahwa suku bunga SBI berpengaruh terhadap inflasi. Di pasar uang, tingginya suku bunga jangka pendek dipicu oleh suku bunga SBI. Mengingat tingkat suku bunga jangka panjang, produsen harus memenuhi persyaratan ini dengan mengurangi investasi, yang berdampak pada produksi dalam negeri suatu negara, yang pada akhirnya menurunkan dan menurunkan tingkat inflasi dalam negeri.

Nasir menyatakan Likuiditas pasar uang dipengaruhi oleh pergeseran suku bunga SBI. Hal ini sejalan dengan temuan Rabin dan Hermawan menunjukkan dampak signifikan SBI terhadap tingkat inflasi. Masyarakat lebih memilih menabung di bank ketika suku bunga naik, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan harapan memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Selain itu, SBI telah mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dengan menurunkan permintaan terhadap produk dan jasa yang dikonsumsi, sehingga menurunkan harga dan menurunkan inflasi.

Sedangkan dalam Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar melalui defisit anggaran dalam upaya mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Yang dilakukan dalam Islam adalah menyediakan infrastruktur bagi sektor riil dan mempercepat aliran uang. Kelebihan likuiditas uang, yang tidak dapat disimpan atau dipinjamkan dengan bunga, menjadi pendorong percepatan perputaran uang. Sementara itu, qardh (meminjamkan uang), sedekah, dan kerja sama ekonomi dalam bentuk syirkah atau mudharabah disarankan sebagai cara untuk menarik uang. Manfaat utama dari pendekatan kolaboratif ini adalah para pelaku dan penyandang dana bersama-sama memperoleh pengetahuan, informasi, teknik pemantauan, keterampilan manajemen, dan pengalaman menghadapi bahaya bisnis (Kholid, 2016).

Penelitian kebijakan moneter bebas bunga oleh Irwan Maulana (2019), syarat adanya peraturan kebijakan moneter bebas bunga dari pemerintah yang bekerjasama dengan bank sentral. Pertama, daripada mengubah uang menjadi komoditas yang dapat diperjual belikan, biarkan uang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam masyarakat dan sebagai representasi nilai suatu barang. Kedua, dengan menggunakan akad muamalah Islam, kebijakan moneter bebas bunga diubah menjadi skema bagi hasil atau investasi pada ekonomi riil (Hiya, 2022).

Besar kecilnya distribusi keuntungan perekonomian di sektor moneter didasarkan pada hasil pembiayaan bank dan investasi di sektor riil. Return di sektor moneter akan meningkat jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan lancar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadaan sektor riil tercermin pada keadaan sektor moneter. Ketiga, cara menerapkan kebijakan moneter bebas bunga adalah dengan mengarahkan uang yang beredar ke sektor riil dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan produktivitas dan dengan memberikan peluang investasi riil sebagai sarana menjaga keseimbangan dan mengendalikan jumlah uang di dalam negeri.

Berdasarkan studi ekonomi, bank sentral syariah mempunyai berbagai tujuan, termasuk memproduksi dan mendistribusikan uang bersama-sama dengan pemerintah dan berkomitmen untuk bertindak sebagai pengawas lembaga keuangan yang sudah ada, pengelola sistem keuangan negara untuk meningkatkan stabilitas dan fokusnya, dan stabilisator internal dan eksternal. Sejak zaman Nabi SAW, kebijakan ekonomi Islam dilakukan tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Dengan demikian, hal ini menjadi landasan yang kuat untuk implementasi saat ini (Turmudi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al.* (2022) menyatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menurunkan inflasi secara syariah dengan memanfaatkan beberapa instrumen kebijakan moneter Islam sebagai pengganti instrumen berbasis bunga. Salah satu instrumen tersebut adalah saham komersial berupa sertifikat musyarakah berbasis PLS yang dijual kepada masyarakat, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Penjualan SBIS kepada publik dapat mengontrol jumlah uang yang beredar dengan menurunkan Jumlah Uang Beredar (JUB), yang merupakan salah satu tujuan kebijakan moneter. Penurunan JUB dapat mengurangi permintaan barang, mengakibatkan demand pull-inflation, dan pada akhirnya membantu mengendalikan inflasi ketika ekonomi terlalu kuat, menyebabkan inflasi yang tinggi. Selain SBIS, bank yang lebih memilih *repurchase agreement* (repo) dapat menjaminkan SBIS atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syari'ah (FASBIS) untuk mengurangi risiko dan likuiditas karena transaksi bank syari'ah

dengan Praktek Pasar Uang Bank Antar Islam (PUAS) menunjukkan dampaknya terhadap Indeks Harga Konsumen Islam (IHKI) yang relatif rendah, sejalan dengan pengaruh rendahnya terhadap inflasi.

## KESIMPULAN

Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah menekan tingginya inflasi agar tidak menyebabkan dampak buruk terhadap perekonomian negara. Apabila melihat pengendalian beberapa negara asia seperti malaysia, caranya dengan menaikkan suku bunga. Dalam mengendalikan inflasi di Indonesia maka BI mengeluarkan SBI (surat Bank Indonesia) merupakan surat hutang jangka pendek dalam bentuk mata uang rupiah. Hal ini bertujuan agar masyarakat menabung ataupun deposit di bank sehingga berkurang jumlah peredaran uang di masyarakat dan menurunkan tingkat inflasi.

Berbeda halnya dengan cara konvensional dalam pandangan islam menurunkan inflasi dengan cara tidak menggunakan bunga sehingga dalam islam uang tidaak boleh ditimbun dan dipinjamkan dengan bunga dan hal yang dapat menambah likuiditas dengan cara qardh (pinjam kebajikan), sedekah, *profit and less sharing* menggunakan akad mudharabah maupun syirkah. Dan penggunaan uang di sektor rill sehingga terciptanya lapangan pekerjaan sehingga angka inflasi turun. Dan cara yang dilakukan oleh pemerintah melalui cara mengeluarkan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)

## DAFTAR PUSTAKA

- Assa, R. H., Rotinsulu, T. O., & Mandejj, D. (2020). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia Periode : 2006.1 – 2019-2. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 23–33.
- Dr. Achmad Kholid, M. A. (2016). Teori Moneter Islam. In K. Nufus (Ed.), Cv. Elsi Pro.
- Gema, et al. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap inflasi pra dan selama pandemi covid 19. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 225–231. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1761>
- Harahap, F. R., Tambunan, K., & Jannah, N. (2022). Peranan Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2929–2939.
- Haryono, E., Nugroho, W. A., & Pratomo, W. (2019). Mekanisme Pengendalian Moneter Dengan Inflasi Sebagai Sasaran Tunggal. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(4), 68 122. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i4.282>
- Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307>
- Irawan, E. (2023). *Peran Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian : Suatu Kajian Literatur*. 3(4).
- Kelvin, D. (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 181–187. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.422>
- Khoirudin, F. (2021). Modul Ekonomi Moneter. In *Journal of Urban Sociology* (Vol. 3, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.30742/jus.v3i1.1195>

- Pravitasari, C. F., & Insukindro, I. (2023). The Impact of Fiscal-Monetary Policy Interaction on the Indonesian Economy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 159–172. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18586>
- Putri, C., & Sari, M. (2018). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia The Effect Monetary Policy to Inflation in Indonesia*.
- Rahutami, A. I. (n.d.). Kebijakan Moneter Rule Atau Discretion. *Kebijakan Moneter Rule Atau Discretion*, 9(1), 39–48.
- Salim, J. F. (2018). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2000: 1–2010: 12. *E-Kombis*, III(2), 68–76. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23508%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/23508/NTA2OTM=/Pengaruh-Kebijakan-Moneter-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-Di-Indonesia-Periode-Tahun-20001-201012-Ratih-Dian-Yuniarti--F0107107.pdf>
- Saridawati, (Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta). (2018). Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Bi) Rate Terhadap Nilai Tukar Us\$ Dan Inflasi. *Moneter*, II(1), 132–141. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Sudarsono, H. (2018). Analisis efektifitas transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah dalam mempengaruhi tingkat inflasi. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss2.art1>
- Turmudi, I. (2018). *Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam*. 74–90.